

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu menggali potensi serta mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat. Sektor [perdagangan](#) merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota Pariaman, yang kemudian disusul oleh sektor [jasa](#), di mana pada kota ini terdapat 3 buah pasar tradisional. Sektor [industri](#) cukup berkembang di kota ini terutama industri kimia dan logam. Sedangkan sektor [pertanian](#) masih menjanjikan bagi masyarakat setempat di mana sampai tahun 2016 luas areal persawahan yang masih dimiliki kota ini adalah 36.81 % dari total luas wilayahnya, dan sektor pertanian ini juga memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 27.06 % dari total PDRB kota Pariaman. Beberapa tahun belakangan ini, sector pariwisata di Kota Pariaman mulai menggeliat,

terutama wisata pantai dan pulau dikarenakan Kota Pariaman memiliki pantai yang landai dan indah. Fasilitas penunjang mulai dibangun, iklan layanan dan promosi semakin ditingkatkan, tidak hanya lewat media cetak, namun juga melalui elektronik, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame Kota Pariaman di tahun 2016 mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 182.584.975,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 150.981.954,- dan tahun 2014 sebesar Rp.155.740.450,-, sehingga pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pariaman, pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame. Namun kondisi yang terjadi di Kota Pariaman tidak sesuai dengan yang di harapkan. Hal tersebut juga termuat

dalam perkataan Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) yang mengatakan “masih banyak pelanggaran pemasangan reklame yang harus ditertibkan, begitu juga dengan potensi penerimaan pajak baru harus lebih dioptimalkan” (Bisnis Indonesia, 2012:10). Kondisi yang dijelaskan oleh Ketua ASPRI tersebut juga terjadi di Kota Pariaman dimana, potensi pajak reklame di Kota Pariaman cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman yang sekarang berganti nama menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman masih belum optimal.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan potensi pajak tersebut adalah, belum diperolehnya angka pasti dari jumlah potensi pajak reklame tersebut. Penentuan target ditetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi dikarenakan penentuan target tersebut tidak menggunakan potensi sesungguhnya. Dalam menentukan target tersebut, lebih sering menggunakan data historis atau berdasarkan dari angka realisasi tahun lalu kemudian dinaikkan sekian persen untuk tahun berikutnya.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Reklame telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Triski Intan, dkk (2015), Dhaniar Fito Ardilas, dkk (2013), Widyaningsih (2009), Adhitya Wardhono, dkk (2012) dan Ferry Susanawati, dkk (2014). Hasil penelitian Ardilas, dkk mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa Gambaran mengenai penerimaan pajak reklame di Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 sampai 2010 dari hasil analisis

rasio rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame menunjukkan bahwa pajak reklame mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2006 sampai tahun 2010 namun menurun pada tahun 2009 sehingga dikategorikan kurang berhasil dan tax effort pajak reklame menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum berhasil menggali pajak reklame secara maksimal dan terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan pemungutan, sedangkan rasio efektivitas pajak reklame pertahun tergolong sangat efektif. Hasil penelitian Widyaningsih (2009) mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode 2001-2007 menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan potensi penerimaan pajak reklame tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Dari fenomena pajak reklame yang ada di Kota Pariaman dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa unsur penelitian tersebut di Kota Pariaman sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame. Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak reklame dapat digali melalui intensifikasi pajak reklame dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak reklame itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Setelah langkah tersebut dilakukan dapat pula diketahui efektivitas pemungutan pajak reklame guna meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak reklame memberikan

kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pariaman**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Pariaman
2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman?
3. Apakah pemungutan pajak reklame Kota Pariaman yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman sudah efektif?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.

#### **1.4. Kegunaan penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data, dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

